

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG 2020-2024



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG 2020-2024



Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 2020-2024

No. Publikasi: 73120.2009
Katalog BPS: 1102001.7312

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman: xii + 106 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Gambar Kover oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Ilustrasi Kover:
Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Diterbitkan oleh:
© **BPS Kabupaten Soppeng**

Kata Pengantar

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS Kabupaten Soppeng) Tahun 2020–2024 disusun untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode 2020-2024. Selanjutnya, Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020–2024 ini menyesuaikan dengan visi dan misi BPS merupakan penjabaran Renstra BPS Tahun 2020–2024 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020–2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020–2024. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Soppeng, 28 Juli 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Soppeng



Ir. H. Rustan

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Untuk menyongsong pembangunan daerah jangka menengah tahun 2020–2024, BPS Kabupaten Soppeng menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Kabupaten Soppeng menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS mengikuti BPS yang telah mencanangkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2020, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten

Soppeng dalam periode Renstra 2020–2024, yakni bahwa BPS Kabupaten Soppeng berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 11 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target outcome dan output.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA);

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam konteks Renstra BPS Kabupaten Soppeng 2020–2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
SK Keputusan Kepala BPS Kabupaten Soppeng.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK	29
2.1. Visi BPS Kabupaten Soppeng	32
2.2. Misi BPS Kabupaten Soppeng	34
2.3. Tujuan BPS Kabupaten Soppeng	37
2.4. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Soppeng	40
2.5. Nilai-Nilai Inti BPS Kabupaten Soppeng	45
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis BPS Kabupaten Soppeng.....	47
3.2. Arah dan Kebijakan Strategis BPS Kabupaten Soppeng.....	64
3.3. Program dan Kegiatan	71
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	75
4.1. Target Kinerja	75
4.2. Kerangka Pendanaan	78
BAB V PENUTUP	83
5.1. Penutup	83
LAMPIRAN	85
Lampiran : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik.....	85
Lampiran : Matriks Kerangka Rugulasi Renstra BPS	101
SK Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)	103

Daftar Tabel

Tabel 1	Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan GAP per Atribut Pelayanan di BPS Kabupaten Soppeng	6
Tabel 2	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019	8
Tabel 3	Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program DMPTL BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (%)	17
Tabel 4	Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program PSPA BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (%)	18
Tabel 5	Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran PPIS BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 %)	19
Tabel 6	Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024	34
Tabel 7	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024	38
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS	41
Tabel 9	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Soppeng	75
Tabel 10	Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	78

Daftar Gambar

Gambar 1	Jenis Data yang Paling Banyak Dicari di PST BPS Kabupaten Soppeng	3
Gambar 2	Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data BPS Kabupaten Soppeng	4
Gambar 3	Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng	5
Gambar 4	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng	5
Gambar 5	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng	7
Gambar 6	Perkembangan Jumlah Aktivitas BPS Kabupaten Soppeng 2015-2019	19
Gambar 7	Kuadran Analisis IPA Hasil SKD 2019	23
Gambar 8	BPS <i>Transformation Roadmap</i> 2018-2021	24
Gambar 9	Keterkaitan Misi dan Arah Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pengembangan	31
Gambar 10	Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 2020-2024	44
Gambar 11	<i>Interlink</i> Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik	52



BADAN PUSAT STATISTIK KAB.SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 199/SK_TIM_RENSTRA/7312/O1/O7/TAHUN 2020

TENTANG

TIM RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BPS KABUPATEN SOPPENG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis;

b. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, maka BPS perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

3. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107).

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NOMOR 9 TAHUN 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut sebagai Renstra BPS Tahun 2020- 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Tahun 2020-2024 memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan BPS;
- (2) Renstra BPS Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Seluruh data dan informasi kinerja Renstra BPS yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPS Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 2 Juli 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG



RUSTAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
NOMOR: 199/SK_TIM_RENSTRA/7312/01/07/TAHUN 2020

TENTANG
TIM RENCANA STARATEGI (RENSTRA)
BPS KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA STARATEGI
(RENSTRA) BPS KABUPATEN SOPPENG

Pengarah : Ir. Rustan
Ketua : Asma,S.Sos
Sekertaris : Ananda Ahada Sya'airillah, SST
Anggota
1. Anny Arjumiaty Anis, SE, MM
2. Muh. Faishal Nur Kamal, SST
3. Asy-Syifa Hanum Farida, SST
4. S. A. Herdiana Putri, S.Stat
5. Nuhari,SE

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran Renstra BPS yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Muatan Renstra BPS Kabupaten Soppeng yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPS dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Substansi pada Renstra BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024 harus disesuaikan dengan Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024, termasuk sasaran pokok RPJMN 2020-2024 yang terintegrasi menjadi sasaran Renstra BPS Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, sasaran dan target pembangunan pada Renstra BPS Kabupaten Soppeng telah mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra BPS 2015-2019.

1.1. Kondisi Umum

Dalam Renstra BPS Tahun 2015 – 2019, visi yang ditetapkan adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem

Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis pada tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkan (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; (3) efektifitas dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 (sembilan) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPS Tahun 2015 – 2019, diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), adapun dalam Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) program yaitu (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA);

1.1.1. Pencapaian Umum Visi BPS Tahun 2015 – 2019

Pencapaian umum visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, hingga tahun 2019, dapat dilihat dari Analisis Hasil Survei

Kebutuhan Data (SKD) 2019. Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2019 adalah konsumen yang pernah menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Soppeng baik yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, surat, layanan online, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa ragam data yang paling banyak dicari konsumen BPS Kabupaten Soppeng adalah data sosial, terutama untuk jenis data kependudukan. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, data tersebut paling banyak diperoleh dari Publikasi Kabupaten Soppeng dalam Angka (Gambar 1).



Gambar 1. Jenis Data yang Paling Banyak Dicari di PST BPS Kabupaten Soppeng

Dari sisi kualitas data BPS Kabupaten Soppeng, hasil SKD 2019 menunjukkan bahwa sebesar 100,00 persen konsumen merasa puas dengan data yang disediakan oleh BPS Kabupaten Soppeng (Gambar 2).



Gambar 2. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data BPS Kabupaten Soppeng

Dari sisi pelayanan data BPS Kabupaten Soppeng, persentase konsumen yang puas dengan pelayanan PST BPS Kabupaten Soppeng mencapai 100,00 persen, terutama atas sikap petugas PST saat memberikan pelayanan. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Kabupaten Soppeng sebesar 100,00 persen, dan dari sisi pemenuhan sarana dan prasarana, 100,00 persen konsumen telah merasa puas dengan pemenuhan sarana prasarana BPS Kabupaten Soppeng (Gambar 3). Sedangkan untuk seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Soppeng ditunjukkan dengan angka Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) yang sebesar 89,46. IKK memperhitungkan antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang dirinci dalam 12 (dua belas) atribut pelayanan.



Gambar 3. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng

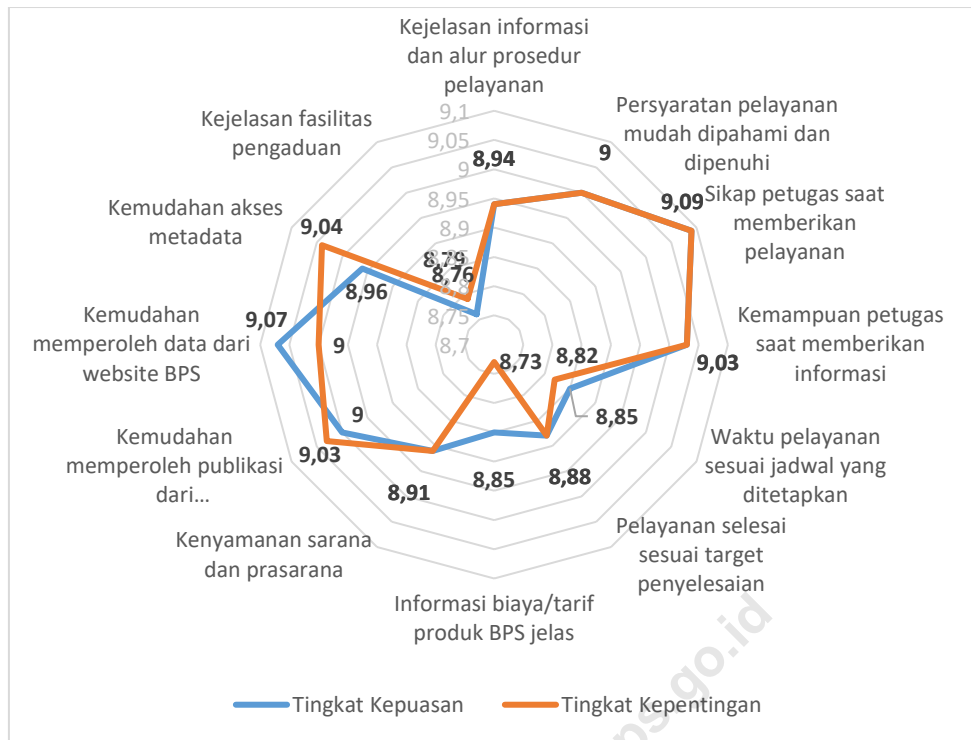
Jika melihat hasil *Gap Analysis* antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan PST di BPS Kabupaten Soppeng, secara umum masih terdapat gap sebesar 0,0072 yang berarti pelayanan BPS Kabupaten Soppeng sudah memuaskan konsumen dan kepuasan tersebut sudah sesuai bahkan melebihi harapan konsumen (Gambar 4).



Gambar 4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng

Tabel 1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap per Atribut Pelayanan di PST BPS Kabupaten Soppeng

No	Atribut Pelayanan	Kepuasan	Kepentingan	Gap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan	8.94	8.94	0,00
2	Persyaratan pelayanan mudah dipahami dan dipenuhi	9.00	9.00	0,00
3	Sikap petugas saat memberikan pelayanan	9.09	9.09	0,00
4	Kemampuan petugas saat memberikan informasi	9.03	9.03	0,00
5	Waktu pelayanan sesuai jadwal yang ditetapkan	8.85	8.82	0,03
6	Pelayanan selesai sesuai target penyelesaian	8.88	8.88	0,00
7	Informasi biaya/tarif produk BPS jelas	8.85	8.73	0,12
8	Kenyamanan sarana dan prasarana	8.91	8.91	0,00
9	Kemudahan memperoleh publikasi dari	9.00	9.03	-0,03
10	PST/Perpustakaan BPS	9.07	9.00	0,07
11	Kemudahan memperoleh data dari website BPS	8.96	9.04	-0,08
12	Kemudahan akses metadata	8.76	8.79	-0,03



Gambar 5. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kabupaten Soppeng

1.1.2. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019

Capaian kinerja BPS Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode Renstra BPS Kabupaten Soppeng 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Soppeng
Tahun 2015-2019 (%)**

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas						
Indikator Tujuan 1 2015-2017 Persentase pemasukan dokumen/ respon rate kegiatan survei statistik		100,00	100,00	100,00	99,64	99,10
Indikator Tujuan 1 2018-2019 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		97,22	97,22	97,22	117,65	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 1 2015-2017						
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu						
1.1.1	Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu	100,00	100,00	100,00	99,65	99,39
1.1.2	Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.3	Jumlah judul publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Statistik Ekonomi					
1.2 Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu						
1.2.1	Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	99,63	100,00
1.2.2	Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 1 2018-2019						
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS						
1.1.1	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	103,13	103,13	97,22	121,95	100,00
1.1.2	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	-	-	-	120,85	120,00
1.1.3	Persentase pemutakhiran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	data MFD dan MBS					
1.1.4	Jumlah release data yang tepat waktu	-	-	-	69,44	100,00
1.1.5	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	-	100,00	100,00	138,46	100,00
1.1.6	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-
1.1.7	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	100,00	100,00	100,00	99,64	99,10
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima hasil kegiatan Statistik						
Indikator Tujuan 2 2015-2017 Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien		146,00	100,00	100,00	101,78	100,00
Indikator Tujuan 2 2018-2019 Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS		130,00	100,00	100,00	101,78	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 2 2015-2017						
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data						

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.1	Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS pengguna data	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	106,25	106,25	100,00	117,65	100,00
2.1.3	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik						
2.2.1	Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	125,00	100,00	116,67	359,93	120,00
2.2.2	Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS	130,00	130,00	110,00	47,50	100,00
2.2.3	Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS	340,00	340,00	100,00	106,67	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 2 2018-2019						

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS2.1 Meningkatnya kualitas Hubungan dengan pengguna data (User Engagement)						
2.1.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	125,00	100,00	116,67	359,93	120,00
2.1.2	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	-	-	-	166,67	111,11
2.1.3	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	-	-	-	103,46	100,00
Tujuan 3 Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan Di bidang Staistik						
Indikator Tujuan 3 2015-2017 Penguatan TIK serta Sarana Kerja		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indikator Tujuan 3 2018-2019 Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		-	-	-	100,00	120,00
Sasaran Strategis Tujuan 3 2015-2017						
3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik						

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.1	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu	100,00	100,00	100,00	-	-
3.1.2	Persentase data mutakhir yang ditampilkan di website BPS Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 3 2018-2019						
SS3.1 Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dalam penyelenggaraan SSN						
3.1.1	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	-	-	-	100,00	100,00
Tujuan 4 Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel						
Indikator Tujuan 4 2015-2017 Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indikator Tujuan 4 2018-2019 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		-	-	-	100,00	100,00
Sasaran Strategis Tujuan 4 2015-2017						
4.1 Memperbaiki sumber daya manusia						
4.1.1	Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV/S1	100,00	98,49	100,00	102,5	120,31
4.1.2	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	85,71

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon					
4.1.3	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	100,00	100,00	100,00	104,00	104,00
Sasaran Strategis Tujuan 4 2018-2019						
SS4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
4.1.1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-	-	-	100,00	100,00
4.1.2	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM	-	-	-	-	-
SS4.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS						
4.2.1	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan pra sarana BPS	-	-	-	99,20	99,20
4.2.2	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	-	-	-	-	66,67

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	aparatur yang diselesaikan					
Rata-Rata Tujuan		112,20	99,54	100,00	102,61	100,00
Rata-Rata Sasaran		116,47	113,97	101,78	123,74	96,21

Sumber: Laporan Kinerja BPS 2015-2019 (diolah)

Dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak 2015, rata-rata capaian kinerja tujuan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dalam tiga tahun terakhir rata-rata nya mencapai 100,00, bahkan di tahun 2018 mencapai 102,6 persen.

Begitu juga dengan perkembangan rata-rata capaian kinerja sasaran, cenderung bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Sama dengan rata-rata kinerja tujuan, tahun 2018 rata-rata nya mencapai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 123,7 persen, walaupun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan khususnya pada indikator yang digunakan. Perubahan tersebut merujuk kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tujuan keempat, "Peningkatan birokrasi yang akuntabel" diukur berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut. Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2014, BPS sempat mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) di tahun 2016 atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2015. Namun kondisi tersebut segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga di tahun berikutnya BPS mampu mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga akhir tahun restra 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tiga tahun sebelumnya.

1.1.3. Prestasi BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019

Beberapa prestasi berhasil diukir BPS Kabupaten Soppng pada periode 2015-2019. Apresiasi tersebut diberikan utamanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi tersebut antara lain:

1. Peringkat 7 (tujuh) Top Inovasi Pelayanan Publik se BPS seluruh Indonesia Tahun 2016
2. 10 (sepuluh) Besar Kualitas Pendataan Susenas September se BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
3. Juara 1 Lomba Kebersihan antar Kantor Vertikal HUT RI Ke 72 se Kabupaten Soppeng Tahun 2017
4. Juara 2 Lomba Kebersihan Hari Jadi Soppeng ke 756 se Kabupaten Soppeng Tahun 2017
5. Juara 1 Lomba Kebersihan antar Kantor Vertikal HUT RI Ke 73 RI se Kabupaten Soppeng Tahun 2018
6. Juara 1 Lomba Kebersihan Hari Jadi Soppeng ke 757 se Kabupaten Soppeng Tahun 2018
7. Juara 2 Lomba Kebersihan antar Kantor Vertikal HUT RI Ke 74 se Kabupaten Soppeng Tahun 2019
8. KSK Lalabata BPS Kabupaten Soppeng masuk ke dalam 5 (lima) besar KSK berprestasi se BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
9. Peringkat 2 Peserta Terbaik Latsar CPNS Golongan III Angkatan 13 Tahun 2018.

1.1.4. Capaian Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Soppeng 2015-2019

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya kenegaraan dan pemerintahan di BPS Kabupaten Soppeng, atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial di BPS Kabupaten soppeng dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran program ini selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program DMPTTL BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (%)

Hasil	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyerapan Anggaran	99,04	98,79	96,65	96,09	98,38

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Kabupaten Soppeng (PSPA)

Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kabupaten Soppeng, antara lain untuk kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik.

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran program ini selama 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program PSPA BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (%)

Hasil	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Kinerja	100,00	100,00	-	-	100,00
Penyerapan Anggaran	99,00	100,00	-	-	99,01

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk:

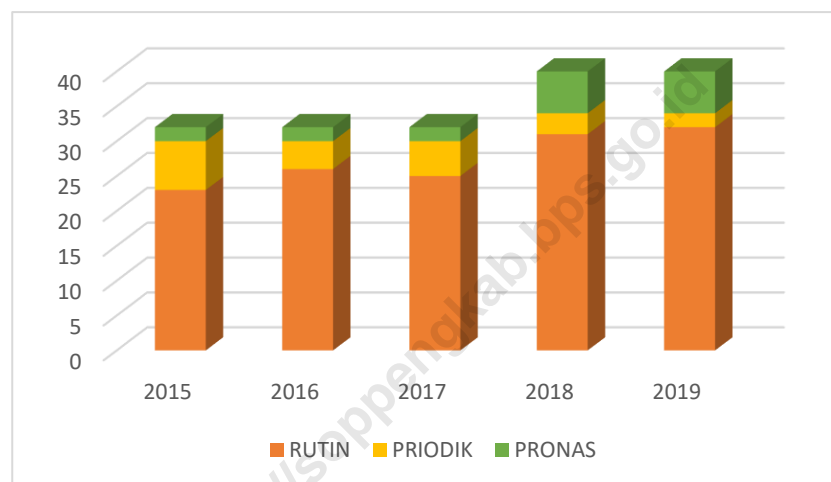
- a. Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas dibidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang lain yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi ;
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, serta komputasi data administrasi;
- c. Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional dibidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat;
- d. Mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan;
- e. Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran program ini selama 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program PPIS BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (%)

Hasil	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyerapan Anggaran	94,65	87,88	90,97	91,74	92,88

Secara umum, banyaknya aktivitas sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Soppeng dapat terlihat pada gambar di bawah:



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Aktivitas BPS Kabupaten Soppeng 2015-2019

Dari Gambar 6, tampak bahwa secara umum jumlah aktivitas BPS Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan pada tahun 2015-2019.

Hasil dari pelaksanaan sensus dan survei tersebut, dihasilkan indikator strategis yang digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi, dihasilkan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setipa sektor dari tahun ke tahun.
2. Persentase penduduk miskin, dihasilkan setiap tahun. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dihasilkan setiap tahun. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
4. Gini rasio, dihasilkan setiap tahun. Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dihasilkan setiap tahun. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), serta dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain indikator strategis di atas, telah dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015), merupakan kegiatan nasional yang dilakukan berdasarkan amanat Inpres RI No. 7/2014 bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap basis data terpadu rumah tangga yang kondisinya dianggap sudah mengalami perubahan karena dikumpulkan pada tahun 2011;
2. SE2016 bermanfaat untuk melihat potensi ekonomi sektor riil, baik output, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dalam negeri atau impor, dan penyerapan tenaga kerja, serta untuk meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, SE2016 juga akan bermanfaat bagi

pengguna data khususnya dunia usaha karena dapat dijadikan dasar perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar, dan potensi pasar;

3. Pendataan Potensi Desa (Podes 2018) yang bermanfaat untuk menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah;
4. Penyusunan Disagregasi PMTB menurut Institusi dan Lapangan Usaha yang bermanfaat untuk Memperoleh data PMTB menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi;
5. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), merupakan kegiatan survey periodik tiap lima tahun setelah pelaksanaan Sensus Penduduk yang bertujuan untuk dapat memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, menyediakan data karakteristik kependudukan dan penghitungan parameter demografi, serta sebagai koreksi terhadap hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035;
6. Inter Regional Input Output memberikan gambaran ekonomi regional untuk mengetahui keterkaitan hulu dan-hilir inter- regional tersebut dan mengidentifikasi kekuatan produk yang dapat mendukung aliran produksi global,
7. Survei Wisatawan Nusantara memperoleh data jumlah perjalanan wisnus, baik dari provinsi/kabupaten asal, maupun provinsi/kabupaten tujuan yang telah menggunakan *Mobile Positioning Data* (MPD);
8. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes Mini) menyediakan data untuk evaluasi alokasi Dana Desa;
9. Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menyediakan data luas panen dan fase pertumbuhan padi dengan menggunakan peta geospasial dan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan untuk mendapatkan angka produktivitas tanaman pangan yang keduanya akan menghasilkan angka produksi padi/tanaman pangan; dan

10. Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018) merupakan Survei Pertanian yang dilaksanakan untuk menjembatani data Sensus Pertanian 2013 dan Sensus Pertanian 2023, merupakan pencacahan dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai perkiraan jumlah rumah tangga pertanian, baik rumah tangga pertanian pengguna lahan maupun rumah tangga bukan pengguna lahan, termasuk rumah tangga petani gurem, dan luas lahan yang dikuasai/diusahakan.

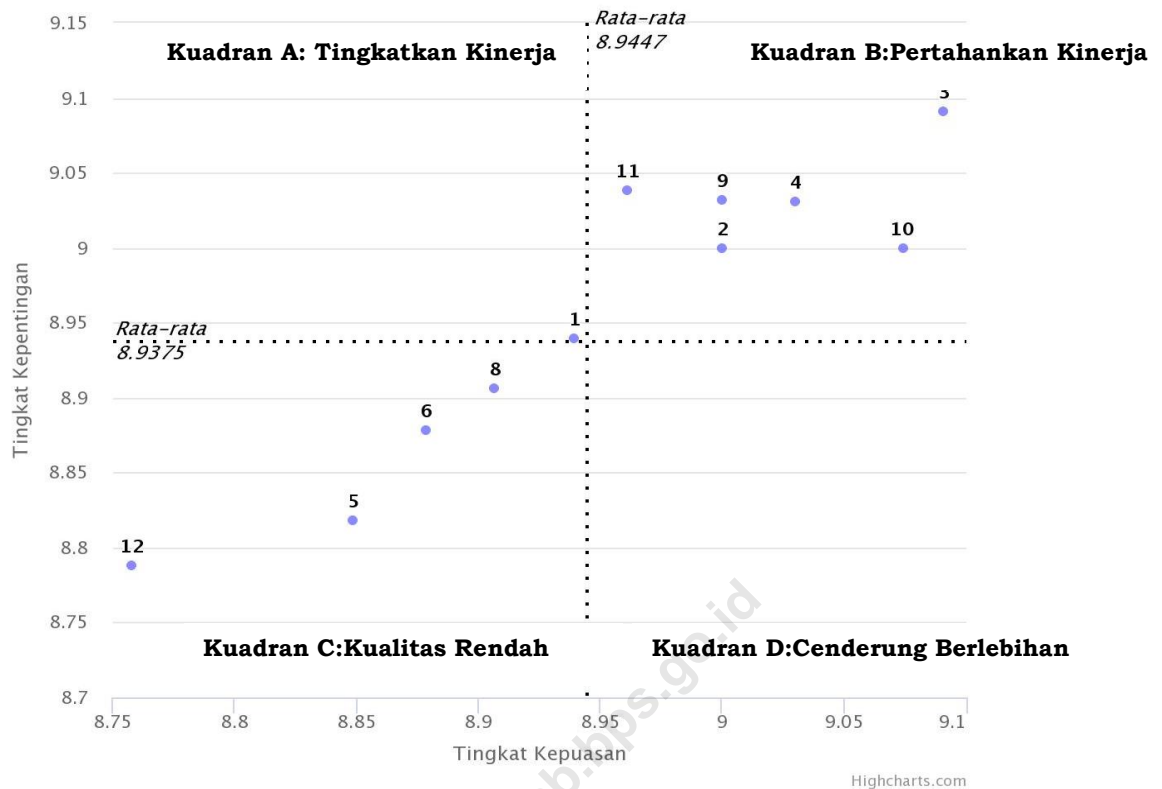
Di sisi lain, banyaknya kerjasama bidang statistik antara BPS Kabupaten Soppeng dengan SKPD lainnya pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Soppeng sebagai instansi pembina statistik masih harus ditingkatkan.

1.1.5. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan tupoksi dan pencapaian kinerja BPS Kabupaten Soppeng didapatkan dari hasil Survei Kebutuhan Data (SKD).

Berdasarkan hasil analisis dari survei yang dilakukan kepada konsumen, baik yang datang langsung ke PST, maupun yang tidak datang langsung, namun pernah memanfaatkan data BPS, ada beberapa atribut pelayanan di PST BPS Kabupaten Soppeng yang direkomendasikan menjadi prioritas utama perbaikan yaitu “Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan (1)”.

Hal ini terlihat dari hasil *Importance and Performance Analysis* Pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada di kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan.



Gambar 7. Kuadran Analisis IPA Hasil SKD 2019

Keterangan	
1. Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan	6. Pelayanan selesai sesuai target penyelesaian
2. Persyaratan pelayanan mudah dipahami dan dipenuhi	7. Informasi biaya/tarif produk BPS jelas
3. Sikap petugas saat memberikan pelayanan	8. Kenyamanan sarana dan Prasarana
4. Kemampuan petugas saat memberikan	9. Kemudahan memperoleh publikasi dari PST/Perpustakaan BPS
	10. Kemudahan memperoleh data dari website

1.2. Potensi dan Permasalahan

BPS memiliki 517 satuan kerja (satker) di level provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan data kepada konsumen BPS, namun dapat juga menjadi permasalahan dalam menghasilkan kualitas data yang sama di seluruh satker. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di BPS.

Potensi dan permasalahan yang dimungkinkan muncul di BPS Kabupaten Soppeng tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, dengan memegang prinsip kerahasiaan data responden dalam setiap proses bisnis statistik.

Potensi BPS yang diharapkan dapat menjadi booster transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam Program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

	2018	2019	2020	2021
Statistik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisasi BPR Survei Berbasis Usaha ▪ Penyusunan BPR Survei berbasis rumah tangga ▪ Ujicoba survei berkelanjutan ▪ CM dan Capacity Building 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisasi BPR Survei Berbasis Rumah tangga ▪ Testcase BPR Survei berbasis usaha ▪ CM dan Capacity Building 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan BPR Untuk Data Administratif ▪ Penyusunan BPR Statistik Harga ▪ Testcase BPR Survei berbasis rumah tangga ▪ CM dan Capacity Building 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan BPR Untuk Neraca Nasional ▪ Testcase proses bisnis yang baru untuk statistik harga ▪ CM dan Capacity Building
TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrated Stat. Information System <ul style="list-style-type: none"> ○ Data management system ○ Integrated collection system ○ Data processing system ○ Implementasi monitoring system ▪ Institutional management system ▪ Arsitektur keamanan ▪ Tata kelola TI ▪ Manajemen layanan TI ▪ Manajemen Risiko TI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrated Stat. Information System <ul style="list-style-type: none"> ○ Analysis system ○ Dissemination system ○ Geospatial system ○ Macro analysis system ○ System piloting ▪ Institutional management system ▪ Arsitektur keamanan ▪ Tata kelola TI ▪ Manajemen layanan TI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrated Stat. Information System <ul style="list-style-type: none"> ○ Frame & register system ○ Statistics knowledge mgt system ○ Survey management system ○ System piloting ▪ Arsitektur keamanan ▪ Manajemen layanan TI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrated Stat. Information System <ul style="list-style-type: none"> ○ System piloting ○ System go live ▪ IT management system
SDM & Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Performance management ▪ Career-talent management ▪ Layanan kepegawaian terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Training & development ▪ Manpower-workforce planning ▪ Recruitmen & selection ▪ Assessment center ▪ SIMPEG berbasis manajemen SDM ▪ Implementation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi dan internalisasi ▪ Finetuning HRMIS ▪ Finetuning regulasi-peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finetuning HRMIS ▪ Finetuning regulasi-peraturan

Gambar 8. BPS Transformation Roadmap 2018 – 2021

Dari *roadmap* di atas, dapat dinyatakan bahwa pada akhirnya peran STATCAP CERDAS tidak lagi hanya menjadi sebuah *booster* bagi BPS, namun sebagai *applicator* dan *enabler* bagi perjalanan perubahan proses bisnis yang ada di BPS. Keseluruhan dari hasil transformasi tersebut harus benar-benar dimanfaatkan baik dari segi inovasi, perubahan, maupun kesiapan BPS menghadapi kemajuan di bidang statistik.

Dari peta potensi dan permasalahan dalam menghasilkan kualitas data tersebut, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS Kabupaten Soppeng dalam rangka mewujudkan Renstra BPS, antara lain:

- a) Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh konsumen merasa puas terhadap data dan layanan yang diperoleh dari PST di BPS Kabupaten Soppeng yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS Kabupaten Soppeng sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBPN yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.
- b) Seluruh konsumen di PST BPS Kabupaten Soppeng menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase 100 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan

Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

- d) Kerjasama BPS Kabupaten Soppeng dengan SKPD lain pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

BPS melakukan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 dalam penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas. Kerja sama tersebut diselenggarakan berdasar MoU nomor 14/PERJ/VIII/2017/B-375/BPS/01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama nomor B-490/BPS/7312/01/08/2019 dan 10/MoU-PK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dalam bentuk Kerja Sama Swakelola Tipe II.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan yang muncul di BPS, antara lain:

- a) Persentase *response rate* atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS Kabupaten Soppeng masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Persentase pemasukan dokumen survei di tahun 2019 yaitu sebesar 99,59 persen. Hal ini seharusnya bisa diatasi dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 19 yang menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan statistik (dalam hal ini adalah BPS) berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.
- b) Untuk mewujudkan sistem dan infrastruktur yang baik di BPS, harus didukung dengan pengadaan barang-barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat. Pengadaan barang-barang TIK tersebut masih terpusat dilakukan oleh BPS RI maupun BPS Provinsi dan alokasi barang masih belum mencukupi kebutuhan yang ada di BPS Kabupaten.
- c) Prasarana dan sarana yang tidak memiliki standar, membuat kebutuhan BPS Kabupaten tidak memiliki arah yang tepat dalam proses penyediaannya. Penekanan *infrastructure grand map* yang menjadi arah pengembangan *office standardized needs* hingga saat ini masih bersifat wacana. Maka perlu adanya perbaikan dalam pemetaannya dan fokus dalam implementasinya guna meningkatkan pelayanan pengguna data dan internal pegawai.

- d) Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada *output* yang dihasilkan guna mencapai *outcome* yang diharapkan. Hal ini berpengaruh pada kualitas data yang berimbas pada tingkat kepuasan pelayanan terhadap pengguna data. Sebagai lembaga yang mempunyai visi “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, diharapkan selalu meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kantor modern yang berprinsip *money follow program* yang berorientasi *outcome*.
- e) Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saat ini yang hanya sebagai *enabler* sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan. Peran TIK saat ini bukan hanya sebagai *tools* tetapi dengan berprinsip “*IT used as salutation in measuring the success*” bukanlah menjadi jawaban terhadap tantangan ke depan. Kelemahan terhadap ketergantungan pada produk TIK memang tidak dapat dihindarkan, namun hal ini jika tidak dimanfaatkan secara tepat menyebabkan kemalasan akibat ketergantungan. Namun dengan menerapkan “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”, diharapkan adanya perubahan mindset dari ketergantungan terhadap TIK menjadi memanfaatkan TIK sebagai solusi dan sesuai fungsi yang efisien terhadap penggunaan anggaran.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

1) Kekuatan/*Strengths*

- a) Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah
- b) Tersedianya infratraktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
- c) Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik

2) Kelemahan/*Weaknesses*

- a) Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
- b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
- c) Keterbatasan kanal diseminasi

- d) Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia

Faktor Eksternal

3) Peluang/ *Opportunities*

- a) BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
- b) Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil
- c) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- d) BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
- e) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
- f) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan stakeholder tertentu.

4) Ancaman/ *Threats*

- a) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data
- b) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas
- c) Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden)
- d) Tingginya *respondent burden* (beban responden)

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK

RPJMN 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan RPJPN 2020 – 2025. Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005 – 2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

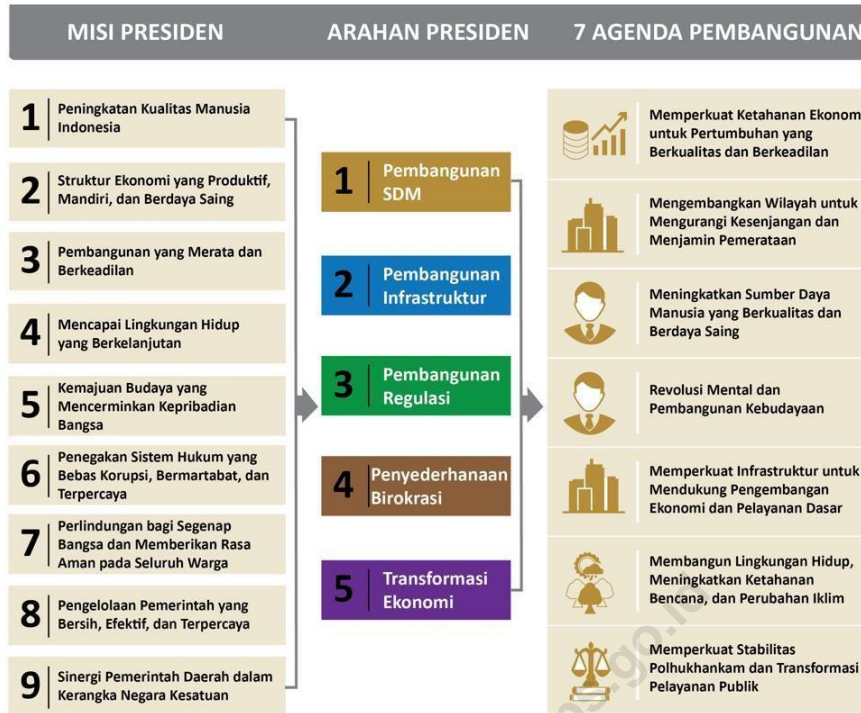
4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan dalam penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar 8.



Gambar 9. Keterkaitan Misi dan Arahannya Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan

Tujuh agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024, sebagai berikut:

1. PN_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. PN_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
3. PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
6. PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. PN_7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dalam melaksanakan RPJMN 2020 – 2024 serta seluruh Visi, Misi, Arah, dan Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, antara lain:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.1. Visi BPS Kabupaten Soppeng

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu

“Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diharapkan mampu mengakomodir berbagai tantangan kedepan, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang dengan keragaman data statistik di lingkup wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap data serta memperhatikan kesiapan SDM dalam penyediaan data berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS Kabupaten Soppeng berperan dalam penyediaan data statistik regional maupun nasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS Kabupaten Soppeng sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di tingkat kabupaten, melainkan juga di tingkat nasional. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

2.2. Misi BPS Kabupaten Soppeng

Misi BPS Kabupaten Soppeng dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Hubungan Visi dan Misi BPS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024

		MISI BPS 2020 – 2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik

nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap

langkahnya terukur)”.
...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3. Tujuan BPS Kabupaten Soppeng

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dapat diamati dan diukur untuk pencapaian keberhasilan. Tujuan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Soppeng untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

**Tabel 7. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan
BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024**

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI 2020-2024	
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional	
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan	
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah	
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 		

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Soppeng untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan

SSN, terkait dengan:

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:

Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia.

2.4. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Soppeng

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Soppeng yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Soppeng. Program BPS Kabupaten Soppeng terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Kabupaten Soppeng (pelayanan internal).

Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Renstra BPS tahun 2020-2024 yang disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kabupaten Soppeng 2020-2024 termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam Technical Meeting (TM) restrukturisasi program BPS terdiri dari:

- (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan
- (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS Kabupaten Soppeng menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard*

(BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS Kabupaten Soppeng telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS Kabupaten Soppeng. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kabupaten Soppeng pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS Kabupaten Soppeng pada periode 2020-2024, antara lain:

1. *Perspektif Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - i. Persentase pengunjung BPS Kabupaten Soppeng yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS Kabupaten Soppeng
 - ii. Persentase pegawai BPS Kabupaten Soppeng yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

- v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan daerah dan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS penilaian SAKIP BPS Kabupaten Soppeng oleh Inspektorat BPS.
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Soppeng



Gambar 10. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 2020-2024

2.5. Nilai-Nilai Inti BPS Kabupaten Soppeng

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS Kabupaten Soppeng telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Soppeng.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

- Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS Kabupaten Soppeng ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS Kabupaten Soppeng ini adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- c. Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah dan Kebijakan Strategis BPS Kabupaten Soppeng

Arah dan kebijakan strategis BPS Kabupaten Soppeng berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- iv. Membuat customer relationship management;
- v. Menyusun data mining pengguna data;
- vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan

- vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
- Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis (TNA)*, pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
6. Peningkatan ketersediaan statistic dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
- ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut

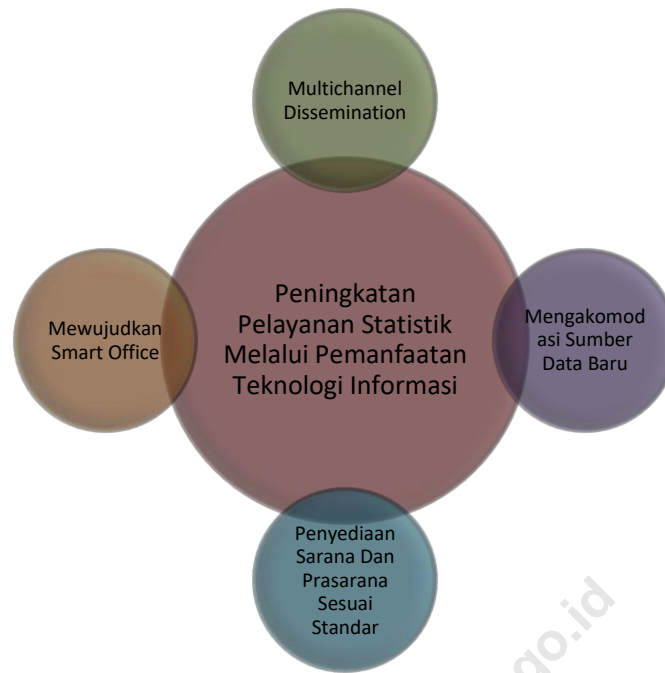
akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



Gambar 11. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratraktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat

dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020- 2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "*role and rule in system and infrastructure*". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

3.1.3.1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah

meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya akurasi data, melalui :
 - a. Integrasi proses bisnis; serta
 - b. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 2. Memastikan kemutakhiran data dengan :
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - b. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c. Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 3. Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 4. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
 5. Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
 6. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
 7. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
 8. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia
- 3.1.3.2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
 2. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
 3. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK
- 3.1.3.3. Meningkatkan Pelayanannya Prima dalam Penyelenggaraan SSN
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
2. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
2. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

- 3.1.3.4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 2. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung

- pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - b. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
 - c. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
3. Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - b. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - c. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - d. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - e. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
 - f. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
 - g. *Talent pool* untuk suksesi organisasi
4. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - b. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
5. Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - b. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
6. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
7. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas

- kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
8. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
 9. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - b. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - c. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
 11. Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Merumuskan *grand design smart office*
 - b. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data

dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
 - ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
 - iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
 - v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
 - vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
 - vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka

memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat)

pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan

perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik

- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
 - iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk

mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data

statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S- 302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

3.2. Arah dan Kebijakan Strategis BPS Kabupaten Soppeng

Arah kebijakan strategi BPS Kabupaten Soppeng pada dasarnya merujuk pada arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020-2024 yang

tertuang dalam Rencana Strategis BPS RI 2020-2024. Adapun arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 BPS Kabupaten Soppeng mengalami penyesuaian sesuai kondisi di Kabupaten Soppeng, yang meliputi:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang penyelenggaraannya di Kabupaten Soppeng
Arah kebijakan BPS Kabupaten Soppeng yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan mengikuti perencanaan yang telah disusun BPS RI dalam harmonisasi penyelenggaraan sensus dan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data
Arah kebijakan yang bisa dilakukan oleh BPS Kabupaten Soppeng, antara lain:
 - a. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - b. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.
Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iii. Membuat customer relationship management;
 - iv. Menyusun data mining pengguna data;
 - v. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vi. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
BPS Kabupaten Soppeng dalam hal ini tidak terlibat langsung dalam penentuan jumlah pegawai tetap. Akan tetapi, BPS Kabupaten Soppeng bertanggung jawab terhadap kompetensi pegawainya serta mitra kerja yang bertugas di lapangan. Adapun arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS dan mitra;
- b. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien;

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS dengan mengikutkan pegawai BPS Kabupaten Soppeng pada kegiatan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai;
- ii. Pemenuhan jumlah pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional;
- iii. Manajemen mitra.

- 4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan;
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

- 5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan bisa dilakukan oleh BPS Kabupaten Soppeng yaitu memastikan semua sensus dan survei yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun berdasarkan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan penerapan

standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik.

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis kegiatan statistik.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS yang juga diikuti oleh BPS Kabupaten/Kota tidak terkecuali BPS Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi BPS Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS akan tetap berpedoman pada tujuan-tujuan utama BPS yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Soppeng. Tujuan BPS Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 meliputi:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan

pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - a. Integrasi proses bisnis; serta
 - b. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - Memastikan kemutakhiran data dengan :
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - b. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c. Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 - Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
 - Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- Koordinasi dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Mengikutkan pegawai BPS Kabupaten Soppeng dalam kegiatan penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)

- ii. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
 - iii. Sharing knowledge yang dilakukan antar pegawai BPS Kabupaten Soppeng
- b. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- c. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- d. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- e. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan

- iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- g. Mewujudkan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengimplementasikan *smart office* di BPS Kabupaten Soppeng.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Kabupaten Soppeng memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kabupaten Soppeng, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di satuan kerja BPS Kabupaten Soppeng.

Program Dukungan Manajemen di BPS Kabupaten Soppeng hanya terdiri dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan generik beserta komponennya, yaitu:

- 1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, terdiri dari:

- i. Pengadaan kendaraan bermotor; dan
 - ii. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker, terdiri dari:
 - i. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran;
 - ii. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - iii. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - iv. Pengelolaan kepegawaian; serta
 - v. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
3. Layanan Perkantoran, terdiri dari:
 - i. Gaji dan tunjangan;
 - ii. Operasional dan pemeliharaan kantor.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kabupaten Soppeng secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan beserta komponennya, yaitu:

1. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:

 - i. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus; serta
 - ii. Peningkatan kualitas dan layanan publikasi.
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran

Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:

 - i. Penyusunan komponen pengeluaran rumah tangga dan institusi nirlaba triwulanan/tahunan dan penyusunan

- SUT//IO sisi USES;
- ii. Penyusunan komponen pengeluaran pemerintah triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi USES;
 - iii. Penyusunan komponen PMTB dan inventori triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi USES; serta
 - iv. Penyusunan konsolidasi PDRB pengeluaran triwulanan dan tahunan.
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
Pada kegiatan ini hanya terdiri dari komponen kegiatan penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 100.
4. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Pemutakhiran sistem dan program MFD dan MBS berbasis web; dan
 - ii. Pemutakhiran peta wilayah kerja statistik.
5. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Kompilasi data transportasi;
 - ii. Survei perdagangan antar wilayah;
 - iii. Penyusunan direktori pasar dan pusat perdagangan.
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Survei harga pedesaan; dan
 - ii. Indeks kemahalan konstruksi.
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Survei industri besar/sedang tahunan;
 - ii. Survei industri mikro dan kecil (VIMK) tahunan;
 - iii. Survei industri mikro dan kecil (VIMK) triwulanan;
 - iv. Survei pertambangan, energi, penggalian, captive power, dan updating direktori; serta
 - v. Survei konstruksi.

8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) semesteran;
 - ii. Survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) tahunan;
 - iii. Publisitas SP2020; dan
 - iv. Pendataan short form SP2020
9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat
Pada kegiatan ini hanya terdiri dari komponen kegiatan Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi.
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Penyusunan statistik politik keamanan; dan
 - ii. Pendataan pemutakhiran data perkembangan desa tahun 2019.
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Survei statistik badan usaha dan pasar modal;
 - ii. Survei bidang jasa pariwisata; dan
 - iii. Survei statistik keuangan pemerintah daerah.
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
Pada kegiatan ini hanya terdiri dari komponen kegiatan survei perusahaan peternakan dan RPH/TPH.
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Pada kegiatan ini terdiri dari komponen kegiatan:
 - i. Survei pertanian tanaman pangan/ubinan;
 - ii. Survei hortikultura dan indikator pertanian; serta
 - iii. Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode kerangka sampel area.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Soppeng 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS Kabupaten Soppeng untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS Kabupaten Soppeng menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS Kabupaten Soppeng. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 9. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penang- gung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkat nya pemanfaat an data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	83.33	83.35	83.37	83.4	83.43	IPDS

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penang- gung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	31	31	31	31	31	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, dan Nerwilis
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	3	4	5	6	7	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	10	11	12	13	14	IPDS
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	10	12	14	16	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57.07	57.50	58.15	60.20	65.50	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	83.33	85.05	86.35	88.45	90.00	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS Kabupaten Soppeng memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS Kabupaten Soppeng dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Soppeng

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b) Hasil penilaian RB oleh Inspektorat

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Soppeng
- b) Capaian penerapan *smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS Kabupaten Soppeng sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya

42. Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Soppeng selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Pusat Statistik	4.584	6.042	5.518	5.316	5.631
054.01.01 Program Dukungan Manajemen	3.479,1	3.879,3	4.214,7	4.037,2	4.200,8
KEGIATAN 2886: BPS Provinsi/Kabupaten/Kota (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	3.479,1	3.879,3	4.214,7	4.037,2	4.200,8

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.105,0	2.163,1	1.303,7	1.278,5	1.430,4
KEGIATAN 2897: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Statistik)	26,5	36,3	37,6	38,9	40,3
KEGIATAN 2898: Seksi Wilayah dan Analisis Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran)	19,3	27,1	29,2	31,4	33,7
KEGIATAN 2899: Seksi Wilayah dan Analisis Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Produksi)	8,7	10,0	10,4	10,9	11,3
KEGIATAN 2900: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)	0,85	6,64	6,95	7,27	7,59
KEGIATAN 2901: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Sistem Informasi	0	1	1	1	1

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)					
KEGIATAN 2902: Seksi Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)	2,1	6,1	6,2	6,4	6,6
KEGIATAN 2903: Seksi Statistik Distribusi Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)	20,7	36,2	37,5	38,8	34,3
KEGIATAN 2904: Seksi Statistik Produksi Statistik Industri (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian , Energi, dan Konstruksi)	27,7	47,0	50,9	54,9	58,8
KEGIATAN 2905: Seksi Statistik Sosial Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)	486,3	1.162,2	255,3	275,8	311,6
KEGIATAN 2906: Seksi Statistik Sosial	253,7	302,0	383,7	326,4	340,2

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)					
KEGIATAN 2907: Seksi Statistik Sosial Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)	23,1	95,4	36,6	23,3	106,1
KEGIATAN 2908: Seksi Statistik Distribusi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)	12,3	19,6	22,0	24,3	26,7
KEGIATAN 2909: Seksi Statistik Produksi Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan)	5,9	8,6	8,9	9,2	9,6
KEGIATAN 2910: Seksi Statistik Produksi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	217,9	406,0	418,4	431,0	443,7

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)					

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel.

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB V PENUTUP

5.1. Penutup

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di

pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

Tabel 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								4,584	6,042	5,518	5,316	5,631	
	T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Kabupaten Soppeng											IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional		83.33	83.35	83.37	83.4	83.43						
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang Berkualitas												
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional		83.33	83.35	83.37	83.4	83.43						IPDS (Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional		31	31	31	31	31						Sosial, Produksi, Distribusi , Nerwilis
	T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kabupaten Soppeng											
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar		10	11	12	13	14						IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN												
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik		3	4	5	6	7						IPDS
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar		10	11	12	13	14						
	T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kabupaten Soppeng											
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		0	10	12	14	16						Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I												
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK		3	4	5	6	7						Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
	T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi												
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		57.07	57.57.50	58.15	60.20	65.50						Tata Usaha
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan												
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		57.07	57.10	57.15	57.20	57.50						Tata Usaha

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS		83.33	85.05	86.35	88.45	90.00							Tata Usaha
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								3,479.1	3,879.3	4,214.7	4,037.2	4,200.8		
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Kabupaten Soppeng												
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)		85.71	85.71	100	100	100							Tata Usaha
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)		23.81	28.57	28.57	28.57	28.57							Tata Usaha
	Progress Pengembangan jabatan fungsional baru (%)		0	0	1	1	1							Tata Usaha
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS	Kabupaten Soppeng												Tata Usaha
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		57.07	57.50	58.15	60.20	65.50							Tata Usaha
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard	Kabupaten Soppeng												Tata Usaha
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		83,33	83,35	83,35	83,38	83,40							Tata Usaha
	Jumlah satker yang menerapkan smart Office		1	1	1	1	1							
	Dokumen grand design smart office		0	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)		Kabupaten Soppeng						3,479.1	3,879.3	4,214.7	4,037.2	4,200.8	Provinsi/ Kab/Kota
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS			1	1	1	1	1						Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit		0	3	3	2	2						Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit		0	3	3	4	2						Tata Usaha
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit		0	6	5	4	3						Tata Usaha
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2		0	789	789	789	789						Tata Usaha
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2		0	100	100	100	100						Tata Usaha
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik			1	1	1	1	1						Tata Usaha
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu		72	73	74	74	75						Tata Usaha
Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1						Tata Usaha
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)		100	100	100	100	100						Tata Usaha
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan								1,105.0	2,163.1	1,303.7	1,278.5	1,430.4	
	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik yang berkualitas	Kabupaten Soppeng											
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)		83.33	83.35	83.37	83.4	83.43						IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)		0	20	25	30	35							IPDS
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Kabupaten Soppeng												IPDS
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		10	11	12	13	14							IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)		3	4	5	6	7							IPDS
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)		0	3	4	5	6							IPDS
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Kabupaten Soppeng												
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)		0	3	4	5	6							IPDS
KEGIATAN 2896: Seksi Wilayah dan Analisis Analisis Statistik dan Neraca Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)		Kabupaten Soppeng						0	0	0	0	0	0	Nerwilis
	Tersedianya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas		2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2							Nerwilis
	Jumlah model statistik sosial dan Ekonomi		0	1	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah Release data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat Waktu		0	1	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah Indikator Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Gender yang Disusun		0	1	1	1	1							Nerwilis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Indikator/data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi		0	1	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode Small Area Estimation (SAE)		0	0	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistics		0	0	0	1	1							Nerwilis
	Jumlah kegiatan statistik di Subject Matter yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri		0	0	1	2	3							Nerwilis
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0		
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik		0	0	1	1	1							Nerwilis
KEGIATAN 2897: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)		Kabupaten Soppeng						26.45	36.3	37.6	38.9	40.3	IPDS	
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN		1	1	1	1	1	11.02	15.13	15.66	16.21	16.78	IPDS	
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		6	6	6	6	6							IPDS
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa		6	6	6	6	6							IPDS
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		0	0	1	1	1							IPDS
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi		0	0	1	1	1							IPDS
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I		0	0	1	1	1							IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		1	1	1	1	1	15.43	21.19	21.93	22.69	23.49	IPDS
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen		30	30	30	30	30						IPDS
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)		100	100	100	100	100						IPDS
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website		8653	8655	8660	8665	8670						IPDS
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1						IPDS
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	1	1	1	1						IPDS
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan		89.46	89.48	89.5	89.52	89.54						IPDS
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data		-	-	-	-	-						IPDS
KEGIATAN 2898: Seksi Wilayah dan Analisis Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)		Kabupaten Soppeng						19.3	27.1	29.2	31.4	33.7	Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas		1	1	1	1	1	19.3	27.1	29.2	31.4	33.7	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu		1	1	1	1	1						Nerwilis
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu		1	1	1	1	1						Nerwilis
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran		-	-	-	-	-						Nerwilis
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	98	98	98	98						Nerwilis
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	97	97	98	98						Nerwilis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	98	98	98	98							Nerwilis
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)		100	95	95	95	95							Nerwilis
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I		0	0	0	0	0		0	0	0	0		Nerwilis
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1							Nerwilis
KEGIATAN 2899: Seksi Wilayah dan Analisis Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)		Kabupaten Soppeng						8.7	10.0	10.4	10.9	11.3		Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Produksi yang berkualitas		1	1	1	1	1	8.7	10.0	10.4	10.9	11.3		Nerwilis
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan		0	0	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu		1	1	1	1	1							Nerwilis
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	97	97	98	98							Nerwilis
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu		1	1	1	1	1							Nerwilis
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha		-	-	-	-	-							Nerwilis
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%)		95	95	95	95	95							Nerwilis
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (%)		100	100	100	100	100							Nerwilis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis <i>framework terintegrasi</i> seperti SUT (%)		100	100	100	100	100							Nerwilis
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Nerwilis
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1							Nerwilis
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1							Nerwilis
KEGIATAN 2900: Seksi Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)		Kabupaten Soppeng						0.85	6.64	6.95	7.27	7.59		IPDS
	Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna		1	1	1	1	1	0.85	6.64	6.95	7.27	7.59		IPDS
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei		0	0	0	1	1							IPDS
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu		0	1	1	1	1							IPDS
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir		0	0	1	1	1							IPDS
	Persentase data SBR yang terupdate (%)		0	50	55	60	65							
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)		100	100	100	100	100							IPDS
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara		0	0	0	1	1							IPDS
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir		70	55	55	55	55							IPDS
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate		736	90	90	90	90							IPDS
	Persentase subject matter yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%)		0	0	10	15	20							IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)		0	0	0	1	1						IPDS
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu		0	1	1	1	1						IPDS
KEGIATAN 2901: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)		Kabupaten Soppeng						0	0	0	0	0	IPDS
	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	IPDS
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu (%)		100	100	100	100	100						IPDS
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi (%)		60	63	70	73	75						IPDS
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (%)		0	0	0	10	15						IPDS
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan service level agreement (%)		10	10	10	10	10						IPDS
	Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun		13	13	13	13	13						IPDS
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi		0	3	3	4	2						IPDS
	Persentase pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi yang diselesaikan (%)		0	0	10	20	30						IPDS
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas		0	0	1	1	1						IPDS
	Bidang TI yang terbit tepat waktu		0	0	1	1	1						IPDS
	Indeks kepuasan layanan TI		79.05	81.15	82.30	83.40	84.50						IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2902: Seksi Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)		Kabupaten Soppeng						2.1	6.1	6.2	6.4	6.6	Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas		3	3	3	3	3	2.1	6.1	6.2	6.4	6.6	Distribusi
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	0	1	1	1						Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3						Distribusi
	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu		0	1	1	1	1						Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		99	99	99	99	99						Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						Distribusi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0	
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			0	1	1	1						Distribusi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik			0	1	1	1						Distribusi
KEGIATAN 2903: Seksi Statistik Distribusi Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)		Kabupaten Soppeng						20.7	36.2	37.5	38.8	34.3	Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas		0	2	2	2	2	20.7	36.2	37.5	38.8	34.3	Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu		0	2	2	2	2						Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						Distribusi

	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100							Distribusi	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu		0	0	0	0	0							Distribusi
	Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi		3	3	3	3	3							Distribusi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0		Distribusi
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1							Distribusi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1							Distribusi
	KEGIATAN 2904: Seksi Statistik Produksi Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)	Kabupaten Soppeng						27.7	47.0	50.9	54.9	58.8		Produksi
	Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas		5	5	5	5	5	27.7	47.0	50.9	54.9	58.8		Produksi
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	0	1	1	1							Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu		5	5	5	5	5							Produksi
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu		0	0	1	1	1							Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		98	98	99	99	99							Produksi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0		Produksi
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1							Produksi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik		0	0	1	1	1							Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2905 : Seksi Statistik Sosial Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)		Kabupaten Soppeng						486.3	1,162.2	255.3	275.8	311.6	Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas		3	3	2	2	2	486.3	1,162.2	255.3	275.8	311.6	Sosial
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu		0	1	1	1	1						Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						Sosial
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I												Sosial
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	1	1	1	1						Sosial
KEGIATAN 2906 Seksi Statistik Sosial Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)		Kabupaten Soppeng						253.7	302.0	383.7	326.4	340.2	Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas		2	2	2	2	2	253.7	302.0	383.7	326.4	340.2	Sosial
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu		1	1	1	1	1						Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I							0	0	0	0	0	Sosial
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	1	1	1	1						Sosial
KEGIATAN 2907: Seksi Statistik Sosial Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)		Kabupaten Soppeng						23.1	95.4	36.6	23.3	106.1	Sosial
	Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas		2	2	2	2	2	23.1	95.4	36.6	23.3	106.1	Sosial
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu		0	1	1	1	1						Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		0	80	80	80	80						Sosial
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						Sosial
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0	Sosial
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	1	1	1	1						Sosial
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	1	1	1	1						Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2908: Seksi Statistik Distribusi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)		Kabupaten Soppeng						12.3	19.6	22.0	24.3	26.7	Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas		3	3	3	3	3	12.3	19.6	22.0	24.3	26.7	Distribusi
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	0	1	1	1						Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3						Distribusi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		99	99	99	99	99						Distribusi
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu		0	1	1	1	1						Distribusi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0	Distribusi
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1						Distribusi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1						Distribusi
KEGIATAN 2909: Seksi Statistik Produksi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)		Kabupaten Soppeng						5.9	8.6	8.9	9.2	9.6	Produksi
	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas		2	2	2	2	2	5.9	8.6	8.9	9.2	9.6	Produksi
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	1	1	1	1						Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2						Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100							Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		98	98	98	98	98							Produksi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0	0	Produksi
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1							Produksi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1							Produksi
KEGIATAN 2910: Seksi Statistik Produksi Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)		Kabupaten Soppeng						217.9	406.0	418.4	431.0	443.7		Produksi
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas		3	3	3	3	3	217.9	406.0	418.4	431.0	443.7		Produksi
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	0	1	1	1							Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3							Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		92	95	97	98	98							Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		0	0	98	98	98							Produksi
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100							Produksi
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I								0	0	0	0	0	Produksi
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	1	1	1							Produksi
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	1	1	1							Produksi

TABEL 2 : Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Undang-Undang (RUU)	1. RUU tentang Sistem Statistik Nasional sebagai Pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional	Menekankan penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2022
	2. RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik	Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2023

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres)	2. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Melakukan perubahan terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK




SUHARIYANTO



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN

KEPALA BPS KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: B-188/SK TIM RENSTRA/BPS/7312/6/2020

**TIM PEYUSUNAN RENCANA STARATEGI (RENSTRA) BPS KABUPATEN SOPPENG
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tim Penyusunan Rencana Starategis (RENSTRA) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Starategis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng ;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683) ;
 - 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 104. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) ;
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik ;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menenga Nasional Tahun 2020-2024
 - 7 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peyusunan Rencana Starategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024
 - 8 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.sebagaiman telah diubah dengan peraturan kepala Badan Pusat Statsitik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik Tahun 2017 Nomor 108
 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DI Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- 11 Peraturan Kepala BPS No. 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA
KEDUA

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG TENTANG TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN
2020-2024

Menetapkan Nama – Nama Tim Penyusunan Rencana
Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Pelaksana Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pusat
Statistik Tahun 2020-2024. mempunyai tugas untuk
memastikan kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 di Badan
Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Soppeng



Ir. Rustan

NIP. 196612151993011001

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Soppeng

NOMOR : B-188/SK TIM RENSTRA/BPS/7312/6/2020

Tanggal : 22 Juni 2020

**TIM PEYUSUNAN RENCANA STARATEGI (RENSTRA) BPS KABUPATEN SOPPENG
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tugas
1	Ir. Rustan	196612151993011001	Pengarah	Pemeriksa
2	Asma,S,Sos	196309191982022001	Ketua	Mengkoordinir Tim
3	Ananda ahada Sya'irilah SST	19830813201912001	Sekretaris	BAB I
4	Anny Arjumiati Anis,SE,MM	19790525 2003122005	Anggota	BAB II
5	Ir. Muh Nasir	196325051994011001	Anggota	BAB IV,V
6	Muh.Faisal Nur Kamal , SST	199411282018021001	Anggota	BAB I
7	Asy Syfa Harun Farida SST	199503122018022001	Anggota	BAB III
	S.A.Herdiana Putri,S.Stat	199707302019032001	Anggota	BAB IV
9	Nuhari,SE	197002012003122001	Anggota	BAB V

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Soppeng



Ir. Rustan

NIP: 196612151993011001

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Salotungo, Watansoppeng

Telp.: (0484) 21060 Fax.: (0484) 23377

Homepage: <http://soppengkab.bps.go.id>,

E-mail: soppengkab@bps.go.id